

INTISARI

ANALISIS PENGATURAN JUAL-BELI BARANG DALAM CISG DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK INDONESIA

Oleh

Ardia pramesti maharani

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisa mengenai kedudukan analisis terhadap pengaturan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak pada transaksi jual beli internasional yang dikaitkan dengan penelaahan berdasarkan tinjauan hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini Penulis akan melakukan studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi-studi perundang-undangan, sejumlah buku, tulisan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan sebagian atau keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang bersumber dari data sekunder, dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Berdasarkan penelitian analisis mengenai pengaturan yang terdapat didalam konvensi CISG ialah bahwa CISG sebagai pilihan hukum substansial yang menunjukkan bahwa substansi konvensi dapat dirujuk oleh para pihak, hakim atau arbiter sebagai hukum yang menguasai atau mengatur kontrak jual-beli barang internasional (proper law of the contract for the international sale of goods) dalam hal ini ialah didasarkan atas bilamana peraturan hukum perdata internasional menyebabkan berlakunya hukum dari suatu negara peserta. Pada kasus suatu negara bukanlah merupakan negara peserta dalam hal ini ialah Indonesia maka Perbandingan pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hal jual-beli barang yang terdapat didalam CISG maupun KUHPperdata Indonesia sebagai sumber hukum kontrak di Indonesia ialah bahwa pada kontrak jual beli barang dalam pengaturan hukum kontrak di Indonesia memiliki kesamaan yang sebagaimana diatur pula didalam CISG yaitu jugalah mengaur dalam hal memperhatikan prinsip kebebasan berkontrak atau yang disebut dengan (party autonomy) sehingga konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip ini terhadap para pihak ialah bahwa mereka dapat menentukan sendiri choice of law dan choice of forum.

Namun pengaturan yang terdapat didalam KUHPerdara indonesia sebagai sumber hukum kontrak di indoensia ialah terbatas hanya mengenai pemberlakuan terhadap kontrak nasional (domestic) saja. Sehingga untuk dapat menyelaraskan dalam rangka harmonisasi meningkatkan perkembangan transaksi ekonomi secara internasional perlunya diadakan ratifikasi terhadap konvensi CISG 1980 didalam hukum konrak indonesia yang dimana hal ini nantinya mampu untuk menjadi payung dasar bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekonomi lintas negara (internasional) yang mampu memberikan kepastian dan ketepatan dasar hukum bagi para pihak.

ABSTRACT

ANALYSIS SALE OF GOODS ARRANGEMENTS IN THE CISG VIEWED FROM INDONESIAN CONTRACT LAW

By

Ardia Pramesti Maharani

This research explains and analyzes the position of arrangements regarding the rights and obligations of parties to international buying and selling transactions associated with a review based on a review of contract law in Indonesia. This study uses the form of normative juridical research because in this study the author will conduct a document study as well as a review of written legal norms which include research on legal principles. The type of data used in this research is secondary data through statutory studies, a number of books, writings and scientific papers related to the material discussed in this research. The nature of the research in this thesis is descriptive in nature which provides an overview and describes part or all of the object to be studied which is sourced from secondary data, and then the data is analyzed qualitatively in order to obtain the maximum possible results. Based on research analysis regarding the provisions contained in the CISG convention, it is that the CISG is a substantial choice of law which indicates that the substance of the convention can be referred to by the parties, judges or arbitrators as the law that controls or regulates contracts for the sale of international goods (proper law of the contract for the international sale of goods) in this case is based on when international private law regulations cause the law of a participating country to come into force. In the case of a country that is not a participating country, in this case, Indonesia, the comparison of the arrangement of the rights and obligations of the parties in terms of buying and selling of goods contained in the CISG and the Indonesian Civil Code as a source of contract law in Indonesia is that in contracts for the sale and purchase of goods in legal arrangements Contracts in Indonesia have something in common as regulated in the CISG, namely that they also regulate the principle of freedom of contract or so-called (party autonomy) so that the logical consequence of applying this principle to the parties is that they can determine their own choice of law and choice of law. forum but the arrangements contained in the Indonesian Civil Code as a source of contract law in Indonesia are limited to the application of national (domestic) contracts only.

So that in order to be able to harmonize in the context of enhancing the development of international economic transactions, it is necessary to ratify the 1980 CISG convention in Indonesian contract law where this will later be able to become a basic umbrella for business actors to carry out cross-border (international) economic activities that are able to provide certainty and accuracy of the legal basis for the parties.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

ANALISIS PENGATURAN JUAL-BELI BARANG DALAM CISG DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK INDONESIA

Ardia Pramesti Maharani, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>